

**KERJASAMA INDONESIA - UNAIDS (*UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV AND AIDS*) DALAM PENANGANAN HIV/ADS
DI PROVINSI RIAU**

**Oleh: Andre Rivano
(andrerrivano84gmail.com)
Dosen Pembimbing: Dr. Afrizal, S.IP., MA
Bibliografi: 9 Jurnal, 15 Buku, dan 31 Website**

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research describes the cooperation between Indonesia and UNAIDS in handling HIV and AIDS in Riau Province. Handling the HIV / AIDS problem requires the involvement of international organizations to work together with the government so that the handling of this epidemic can be carried out quickly, broadly and in a coordinated manner. United Nations Program on HIV and AIDS or UNAIDS is an IGO which is the main supporter of global action against the HIV epidemic. In Indonesia, HIV AIDS was first discovered in Bali Province in 1987. Until now, HIV AIDS has spread in 407 out of 507 districts / cities or can be said to reach 80 percent of all provinces in Indonesia. In this paper the authors use two theories, namely policy theory and role theory, these theories are considered suitable to explain the response of the Riau government in responding to the cooperation between Indonesia and UNAIDS in dealing with HIV / AIDS in Riau Province.

The results of this study found that policies for handling and preventing HIV / AIDS in Indonesia prioritized adolescents, support for high-risk groups, prevention of mother-to-child transmission, then prioritized care and provided important and accurate information through the mass media. In handling HIV / AIDS cases in Riau Province, the Riau Provincial Government has implemented its policy through Riau Province Regional Regulation Number 4 of 2006 concerning HIV / AIDS Prevention and Control. One of the policies of Riau Province in dealing with HIV / AIDS in its region as recommended by UNAIDS is Preventive Treatment with Isoniazid for HIV or PLWHA. Preventive treatment with Isoniazid for HIV or PLWHA is one of the important health interventions for TB prevention in HIV and has been recommended since 1998 by WHO and the Join United Nations Program on HIV / AIDS (UNAIDS).

Keywords: Cooperation, Unaid, HIV, AIDS,

Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas fenomena gerakan sosial yang berada dalam politik internasional sebagai salah satu aktor non-negara yang penting mengangkat isu dan gejala baru ke dalam ranah hubungan internasional. Dalam perkembangannya, hubungan internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat. Tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, ilmu hubungan internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa, Ilmu hubungan internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi hubungan internasional makin kompleks dengan masuknya aktor IGO (*Inter Governmental Organizations*) dan INGO (*Inter Non-Governmental Organizations*).

Salah satu isu dalam hubungan internasional yang menjadi fokus belakangan ini adalah isu kesehatan, dimana perkembangan pandemik HIV/AIDS terus mengalami peningkatan di berbagai negara. Dalam dekade terakhir, Asia menjadi salah satu kawasan yang dikenal sebagai pusat pandemik global HIV/AIDS. Kasus HIV/AIDS pertama kali dilaporkan berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat, pada 5 Juni 1981. Untuk menangani permasalahan HIV/AIDS diperlukan keterlibatan organisasi internasional, untuk bekerjasama bersama pemerintah. *United Nations Programme on HIV and AIDS* atau UNAIDS merupakan IGO yang menjadi pendukung utama aksi global terhadap epidemik HIV yang cepat, luas dan terkoordinasi.¹

¹ Nizmi, Yusnarida Eka. *Studi Keamanan Internasional*, Pekanbaru: UR Press, 2015, hal. 53

Sebagai sebuah negara besar Indonesia turut aktif dalam penanganan HIV/AIDS di kawasan regional ASEAN, Indonesia menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang terintegrasi, terarah, intensif dan komprehensif bagi kita untuk mencapai komitmen *Sustainable Development Goals* pasca tahun 2015 dan *ASEAN Getting to Zeroes*, dimana Indonesia menjadi *leading country*. Kerjasama antara Indonesia dan UNAIDS sangat diperlukan terutama dalam penanganan daerah-daerah yang dianggap sangat berpotensi seperti di kawasan Sumatera daerah yang berpotensi salah satunya adalah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Kerangka Teori

Penulis menetapkan perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa sistem hubungan internasional tidak semata-mata ditentukan oleh aktor negara (*state actor*), tetapi juga aktor-aktor non-negara (*non-state actors*). Dalam perspektif pluralisme, semua aktor, baik negara maupun non negara, memiliki peran yang sama penting dalam sistem hubungan internasional.² Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yaitu teori kebijakan dan teori peran dengan tingkat analisis kelompok. Level analisis kelompok yang dapat dimengerti dengan tiga pendekatan, yaitu *formalistic*, *competitive*, dan *collegial*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat

² Laode, Muh. Fathun. 2017. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol.1 No.1 Hal. 166. UPN Jakarta

eksplanatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena.³ Sedangkan penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bersifat menjelaskan (*to explain*) berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik berupa fenomena maupun gejala yang muncul, respon terhadap fenomena, tindakan hingga kebijakan yang muncul didalam permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan hal yang sangat penting, karena data merupakan dasar bagi penelitian. Dalam upaya pengumpulan data, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan. Untuk penelitian ini, menggunakan data primer yaitu melalui wawancara dengan dinas kesehatan serta obeservasi. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa teknik menghubungkan teori dengan data-data yang diperoleh dengan melalui riset kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

Saat ini penyebaran HIV/AIDS di Indonesia telah meluas dan dinilai telah menjadi salah satu faktor yang mengancam keamanan manusia di Indonesia. Meski kampanye dan penyuluhan terkait bahaya penularan HIV/AIDS gencar dilakukan namun pada kenyataannya penyebaran virus ini semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk mengatasi semakin meluas dan meningkatnya kasus HIV/AIDS di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk

menanggulangnya. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi meluasnya HIV/AIDS ini adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik tingkat nasional maupun Internasional. Beberapa bentuk kerjasama Indonesia ditingkat internasional terkait penanganan maupun pencegahan HIV diantaranya adalah dengan bekerjasama dengan organisasi Internasional yaitu WHO, AusAID dan termasuk pula dengan bekerjasama bersama UNAIDS.

A. Kerjasama Indonesia dengan UNAIDS

UNAIDS adalah IGO (InterGovernmental Organization) yang bernaung di bawah PBB yang dibawah langsung oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, memiliki tugas dan fungsi untuk mengurus dan menangani masalah yang berhubungan dengan HIV/AIDS di seluruh dunia. UNAIDS membantu pemerintah Indonesia berupa bantuan teknis dan dana. UNAIDS mensponsori berbagai tindakan advokasi di beberapa tempat di Indonesia untuk meningkatkan informasi dan layanan kesehatan. UNAIDS membantu Indonesia melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan memberikan bantuan manajemen kepada KPA untuk pelaksanaan program nasional AIDS, bantuan manajemen salah satunya adalah bantuan penyusunan dan pelaksanaan program-program kerjasama yang dianggap mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam penanggulangan HIV/AIDS baik program kerja jangka pendek, menengah maupun program kerja jangka panjang. Mengapa UNAIDS yang dipilih sebagai Mitra Internasional yang ikut andil dalam penulisan STRANAS, karena adanya program STRANAS 2010 - 2015 yang sejalan dengan program UNAIDS yaitu 3 Zero yang merupakan

³CatherineMarshall dan Gretchen B Rossman, *Designing Qualitative Research 2nd Edition*. Sage Publication, California,1994.hlm.41

Zero infeksi baru, Zero kematian terkait AIDS, Zero Stigma dan diskriminasi.

B. Perkembangan Dan Dampak Hiv/Aids Di Provinsi Riau

Perkembangan jumlah kasus terinfeksi virus HIV di Indonesia bergerak maju dan cepat baik dari sisi wilayah penyebaran maupun pola penyebarannya sendiri. Awalnya tidak semua provinsi yang terinfeksi virus namun kini tak ada satupun dari provinsi yang ada di Indonesia kebal terhadap serangan dari HIV/ AIDS, demikian halnya dengan Provinsi Riau. AIDS cenderung lebih cepat menyerang komunitas seperti para pengguna obat-obatan terlarang, pekerja seks dan kaum seksual minoritas.⁴ Selain orang dewasa, terdapat bayi-bayi yang mengidap AIDS, virus ini ditularkan melalui: 1. Transmisi darah dari ibu-ibu yang mengidap HIV dan sedang mengandung. 2. Transmisi dari kalangan homoseksual paling banyak terjadi di Amerika Utara, Australia, dan Eropa Utara. 3. Transmisi melalui jarum suntik diluar kepentingan medis, biasanya untuk obat-obatan seperti narkoba dan lain-lain, semakin meningkat baik itu di negara berkembang atau di negara industri. Ada 3 cara penularan virus HIV/AIDS yang dipaparkan oleh KPA Riau (komisi Penanggulangan AIDS) diantaranya ialah: AIDS dapat tertular melalui hubungan seksual baik itu secara vaginal, oral maupun anal dengan seorang yang menderita atau terjangkit AIDS.

Kota Pekanbaru merupakan penyumbang Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) terbesar di Riau dengan jumlah 806 kasus, selanjutnya Bengkalis 255

kasus Kota Pekanbaru memiliki penduduk yang bersifat heterogen, seiring dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan zaman kota Pekanbaru memiliki permasalahan yang sangat konflik salah satunya adalah masalah HIV AIDS. Hal ini juga kemukakan oleh Kementrian Kesehatan, RI bahwa kota Pekanbaru termasuk kedalam 100 kabupaten/kota penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Epidemio HIV/AIDS dapat terjadi diduga karena Kota Pekanbaru adalah kota terbuka, merupakan jalur lintasan angkatan darat, laut, sungai, dan udara yang didukung dengan fasilitas transportasi yang memadai serta tingkat mobilitas (datang dan bepergian) yang relatif tinggi, peningkatan pembangunan yang ditandai dengan pesatnya perkembangan pusat-pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat Kota Pekanbaru sangat rawat terinfeksi HIV, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan faktor pendorong meningkatnya jumlah masyarakat berperilaku beresiko terinfeksi HIV/AIDS. Masalah HIV/AIDS makin sangat mengkhawatirkan, karena sebagian besar orang dengan HIV/AIDS ditemukan pada kelompok usia produktif. Kasus HIV/AIDS yang dilaporkan sejak tahun 1987 – Desember 2015 terbanyak pada kelompok usia 20 – 29 tahun yaitu 31,82 % dan diikuti kelompok usia 30-39 tahun yaitu 29,86%. Sedangkan menurut jenis pekerjaan, penderita HIV/AIDS di Indonesia paling banyak berasal dari kelompok ibu rumah tangga, diikuti wiraswasta dan tenaga profesional 2015.⁵

⁴ Tersedia di <<http://www.who.int>> [diakses pada 22 Oktober 2020]

⁵<<http://scholar.unand.ac.id/15012/2/BAB%20I.pdf>> [diakses pada 22 Oktober 2020].

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari dinas terkait, menunjukkan peningkatan kasus yang terjadi di Provinsi Riau dari tahun 2013-2017. Dimana setiap tahun terus terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal inilah yang membuat pemerintah merasa bahwa kasus HIV/AIDS ini mulai membahayakan. Kasus ini tersebar secara luas hampir di semua kota dan kabupaten yang ada di provinsi Riau, dengan Kota Pekanbaru sebagai kasus terbanyak. Umumnya penderita HIV/AIDS berusia antara 17-35 tahun, dimana usia tersebut adalah usia yang produktif dan hal semacam ini dapat mengancam kualitas dan perkembangan generasi muda selanjutnya. Akibatnya tingkat kematian sisetiap tahunnya meningkat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menekan endemik HIV/AIDS adalah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA) yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004. Dimana KPA bertugas dalam menanggulangi, mendampingi, memberikan pelayanan serta edukasi terhadap HIV/AIDS kepada penderita dan masyarakat secara umum.⁶ KPA juga dibentuk di semua daerah/provinsi yang terdapat kasus HIV/AIDS. Pengobatan, dukungan, dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS dilakukan melalui klinik VCT (Voluntary Counseling and Testing) di sarana kesehatan yang ada. Upaya ini telah dilaksanakan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh beberapa

⁶ Evaluasi Program Pemerintah Tentang HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tahun 2012, dipublikasikan oleh Rizki Ananda, FISIP UR. Diakses Pada: <https://media.neliti.com/media/publications/31240-ID-evaluasi-program-pemerintah-tentang-hiv-aids-di-kota-pekanbaru-tahun-2012.pdf>

fasilitas kesehatan milik swasta serta lembaga non-pemerintah lainnya.⁷ Hal ini menunjukkan perhatian khusus yang besar baik dari pemerintah ataupun aktor non-pemerintah terhadap perkembangan endemik ini.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mengatasi Kasus Hiv/Aids

Di Provinsi Riau pengidap penyakit ini tidaklah sedikit, Dinas Kesehatan Provinsi Riau merekap jumlah kasus HIV/AIDS di daerah itu dari tahun 1997 sampai dengan Oktober 2018 tercatat sebanyak 5.418 kasus. Penderita penyakit HIV/Aids ini didominasi oleh usia produktif 20-49 tahun sebesar 75,8 persen, dan tertinggi umum usia 25-29 tahun atau 24,9 persen. Berikutnya usia 30-34 tahun sebanyak 23 persen dan usia 35-39 tahun sebanyak 14,1 persen. Sedangkan berdasarkan daerah kabupaten dan kota, maka tercatat Kota Pekanbaru sebanyak 49,3 persen, Bengkalis 9,9 persen dan Kota Dumai 9,3 persen.⁸

Untuk menangani permasalahan tersebut maka Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan kebijakannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Dalam penanggulangan HIV/AIDS ini Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi surveilans penyakit dan perilaku HIV/AIDS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

⁷ Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya, Diakses di: https://www.bappenas.go.id/files/9113/5230/0986/indonesiamdgbigoal6_20081122001221_518.pdf

⁸ Bintang, Amin "Ada 5.859 Kasus HIV/AIDS, Riau Urutan 11 Nasional," dalam <https://www.cakaplah.com/berita/baca/45228/2019/11/04/ada-5859-kasus-hiv-aids-riau-urutan-11-nasional>. diakses pada 20 oktober 2020.

Kemudian mengumpulkan data epidemiologi yang ada, meningkatkan pelaksanaan penggunaan kondom 100 persen secara bertahap dan jarum suntik sekali pakai di lingkungan kelompok perilaku risiko tinggi selanjutnya adalah mengembangkan sistem dukungan perawatan dan pengobatan untuk ODHA. Dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Provinsi Riau, Pemerintah Daerah dan masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan HIV/AIDS yang benar, jelas dan lengkap melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan secara periodic, melakukan pendidikan keterampilan hidup dan perilaku hidup sehat dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penyalahgunaan Napza melalui sekolah baik di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan sederajat, Pesantren serta Perguruan Tinggi milik Pemerintah maupun milik Swasta, mendorong dan melaksanakan konseling dan testing HIV secara sukarela, memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit termasuk pengobatan dengan obat anti retroviral dan obat anti infeksi oportunistik dengan biaya yang terjangkau, melaksanakan kewaspadaan *Universal Precaution Standart* di Rumah Sakit, Poliklinik dan fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjanya, melaksanakan skrining yang standard terhadap IMS, HIV dan virus hepatitis atas seluruh darah Donor, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain, dan melaksanakan

pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat yang berpotensi menularkan HIV/AIDS bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk mengantisipasi seluruh masalah epidemik yang muncul diseluruh daerah Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau mengadakan koordinasi dengan KPAD Kabupaten/Kota. Beberapa strategi yang disusun oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penularan baru HIV/AIDS juga mengurangi dampak infeksi yang sudah ada adalah dengan melakukan advokasi, promosi, monitoring hak-hak pribadi orang yang terinfeksi HIV, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma standar Internasional, kemudian menggalang kerja sama dengan unsur masyarakat, organisasi profesi, organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan LSM dibidang penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan serta menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun dari luar negeri secara efektif dan efisien. Menghimpun dan menganalisa data dan kegiatan statistik lainnya, sehingga dapat menyusun dan memberikan masukan-masukan kongkrit kepada Pemerintah.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang surveilans, serta dukungan perawatan/pengobatan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang Pendidikan Keterampilan Hidup dilingkungan Lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal. Badan Kesejahteraan Sosial

atau Dinas Sosial Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang pemberdayaan ODHA dan pembinaan kelompok beresiko tinggi. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan dengan mengacu pada penghargaan terhadap Hak-hak Azasi pribadi dan Hak-hak sipil warga negara termasuk kelompok masyarakat rentan. Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki jumlah kasus HIV/AIDS yang tinggi adalah Kota Pekanbaru. Agar pencegahan dan pengulangan HIV/ AIDS ini efektif maka upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait lebih diintensifkan, menyeluruh, dan terpadu dan juga telah dibentuk komisi pengulangan AIDS di daerah. Adapun yang menjadi tugas KPA Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 240 Tahun 2011 adalah mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan komisi penanggulangan AIDS Nasional, memimpin, mengelola, mengendalikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru, menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan

HIV dan AIDS, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru, mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan pemerintah desa/kelurahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, mendorong terbentuknya LSM/Kelompok Peduli HIV dan AIDS, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Nasional.

Bentuk Kerjasama dan Kebijakan Provinsi Riau Berdasarkan Rekomendasi UNAIDS

Salah satu kebijakan Provinsi Riau dalam menangani HIV/AIDS diwilayahnya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh UNAIDS adalah Pengobatan Pencegahan dengan Isoniazid terhadap HIV atau ODHA.⁹ Pengobatan Pencegahan dengan Isoniazid terhadap HIV atau ODHA merupakan salah satu intervensi kesehatan yang penting untuk pencegahan TB pada HIV dan telah direkomendasikan sejak tahun 1998 oleh WHO dan *the Join United Nations Programme on HIV/AIDS*(UNAIDS). Namun Implementasinya belum meluas.¹⁰

⁹A.O Nababan “Tinjau Baksos Operasi Katarak Gubri Berharap Lebih Sering Dilakukan,” dalam <https://www.riausidik.com/pemprovriau-116201-2016-09-27-gubri-berharap-lebih-sering-dilakukan.html>. diakses pada 22 Oktober 2020.

¹⁰Humas Pemprov Riau “ Pertemuan Diseminasi Pengobatan Pencegahan TB pada HIV di Provinsi

Di Indonesia beberapa strategi yang diterapkan untuk penanganan HIV/AIDS berdasarkan rekomendasi UNAIDS dan merupakan strategi kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS meliputi kondomisasi, substitusi metadon, dan pembagian jarum suntik steril. Upaya tersebut menjadi kebijakan nasional di bawah koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Strategi utama dari UNAIDS untuk menangani epidemic HIV/AIDS ini diantaranya adalah pengobatan dengan ART Terapi antiretroviral (ART) yaitu pengobatan orang yang terinfeksi dengan human immunodeficiency virus (HIV) dengan menggunakan obat anti-HIV. Pengobatan standar terdiri dari kombinasi setidaknya tiga obat (sering disebut "terapi antiretroviral (ART) yang sangat aktif" yang menekan replikasi HIV. Tiga obat digunakan untuk mengurangi kemungkinan virus mengembangkan resistansi. ART memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kematian dan kesakitan di antara orang terinfeksi HIV, dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kemudian selain itu terdapat pula strategi Kondom yang dinilai UNAIDS sangat efektif untuk mencegah HIV/AIDS. Menurut UNAIDS kondom yang optimal adalah bagian penting dari target global terhadap layanan pencegahan komprehensif kepada 90% orang yang berisiko terinfeksi HIV dan untuk mengurangi infeksi HIV baru menjadi kurang dari 500.000 di seluruh dunia, negara-negara sepakat dalam

Riau,” dalam <https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/03/21/1863-pertemuan-diseminasi-pengobatan-pencegahan-tb-pada-hiv-di-provinsi>. diakses pada 22 Oktober 2020.

Deklarasi Politik tentang HIV dan AIDS tahun 2016 untuk meningkatkan Ketersediaan kondom tahunan menjadi 20 miliar pada tahun 2020.¹¹ Selain itu terdapat pula kebijakan *Harm Reduction*. Istilah *Harm Reduction* atau dalam bahasa Indonesia disebut pengurangan dampak buruk sudah sering terdengar dalam program penanggulangan AIDS di Indonesia bahkan di dunia.¹² Strategi-strategi yang sudah dilakukan UNAIDS belum sepenuhnya berhasil atau belum efektif. Misalnya saja tentang rekomendasi program UNAIDS yang disebut dengan *Harm Reduction* masih banyak mengalami hambatan dan rintangan. Program *Harm Reduction* bertujuan mengurangi angka penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dan hubungan seks bebas. Dengan kegiatannya membagi-bagikan jarum suntik, pembagian kondom secara gratis. Program ini belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh UNAIDS di Indonesia, apalagi di Provinsi Riau karena tidak sesuai dengan budaya Riau. Beberapa faktor tidak efektifnya strategi-strategi UNAIDS ini di Indonesia, khususnya di Riau yaitu dikarekan sulitnya mengubah perilaku para pecandu narkoba untuk mengubah kebiasaan berbagi jarum suntik untuk menggunakan jarum suntik seteril.

¹¹ Suhendra, Yulman “Upaya Joint Nations Program On Hiv/Aids (Unaid) Dalam Penanganan Hiv/Aids Di Nigeria,” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/123376-ID-upaya-joint-nations-program-on-hiv-aids-u.pdf>. diakses pada 22 Oktober 2020.

¹²Harm Reduction Di Indonesia dalam <https://www.kebijakanaidsondonesia.net/id/beranda/28-pengantar-introduction/385-harm-reduction-di-indonesia>. diakses pada 23 Oktober 2020.

Para pecandu narkoba adalah orang-orang yang rentan terinfeksi HIV/AIDS.

Kemudian, dengan membagi-bagikan jarum suntik kepada para pecandu narkoba, oleh karena itu program *Harm Reduction* bertentangan dengan hukum Indonesia sesuai UU No 5 Tahun 1997 dan UU No 22 Tahun 1997 karena dinilai program ini justru memberikan dorongan moril kepada para pecandu narkoba untuk tetap menggunakan narkoba. Selanjutnya adalah faktor wilayah, Indonesia yang sangat luas dan terpisah-pisah oleh lautan membuat sulitnya penyebaran informasi sampai ke pelosok nusantara dan kaum muslim di Indonesia sebagian besar menolak program UNAIDS ini terutama program *Harm Reduction* karena program membagi-bagikan kondom dan jarum suntik steril berlawanan dengan akidah islam.¹³

Strategi UNAIDS dalam Pandangan Budaya Lokal Riau

Strategi UNAIDS untuk mencegah peningkatan dan meluasnya HIV/AIDS disuatu negara atau wilayah diantaranya adalah tidak menggunakan jarum suntik yang sama diantara kelompok yang beresiko tinggi terkena HIV/AIDS, kemudian perluasan penggunaan kondom. Namun, di Provinsi Riau, strategi tersebut tidak menjadi yang utama meski diterapkan dan terdapat dalam perda terutama tentang penggunaan jarum suntik sekali pakai karena menyuarakan penggunaan kondom secara luas tidak sesuai dengan budaya lokal Riau dan pemerintah Provinsi Riau lebih

menganjurkan dan mengarahkan kepada untuk setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan yang sah. Untuk menangani dan upaya pencegahan HIV/AIDS di Provinsi Riau, pemerintah setempat sangat mengedepankan sosialisasi mengenai bahasa HIV/AIDS, sebab terjangkitnya dan upaya untuk menghindarinya. Salah cara untuk menghindarkan diri dari bahaya HIV/AIDS ini oleh pemerintah provinsi Riau dicantumkan dalam perdanya adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan setiap pribadi masyarakat di Provinsi Riau, kemudian tidak melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah.

Kemudian terdapat pula kebijakan untuk menanggulangi HIV sebagai penyakit menular melalui Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yaitu Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus;
- f. pemberian kekebalan (imunisasi)
- g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
- h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Yang tercantum dalam peraturan menteri ini merupakan upaya-upaya yang secara maksimal dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau untuk mengatasi dan mencegah meluasnya HIV/AIDS di Provinsi Riau. Ketua Pelaksana KPA Provinsi Riau, Edy juga menyebutkan bahwa untuk menangani

¹³Idayu, Prima R., and Indra Pahlawan. "Efektifitas United Nations Programme On HIV And AIDS (Unaid) Menangani Hiv/aids di Indonesia Tahun 2009-2012." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 1, no. 2, Oct. 2014.

permasalahan epidemic HIV/AIDS ini dibutuhkan kerjasama seluruh lintas program, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta anggota KPA Provinsi Riau untuk bersama-sama memerangi dan menanggulangi penyakit yang mematikan tersebut. Sebab penanggulangan HIV/AIDS di Riau tidak akan berhasil apabila hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan saja. Selain itu ia juga memaparkan strategi rencana aksi daerah Riau dalam penanggulangan HIV/AIDS yaitu dengan mencegah dan mengurangi penularan HIV baru, meningkatkan kualitas hidup Orang Yang berstatus HIV Positif (ODHA) dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.¹⁴

SIMPULAN

Kebijakan penanganan serta pencegahan HIV/AIDS di Indonesia diprioritaskan kepada Remaja, dukungan pada kelompok resiko tinggi, pencegahan penularan dari ibu ke anak, kemudian memprioritaskan perawatan dan memberikan informasi yang penting dan tepat melalui media massa. Dalam penanganan kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau, maka Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan kebijakannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Salah satu kebijakan Provinsi Riau dalam menangani HIV/AIDS diwilayahnya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh UNAIDS adalah Pengobatan Pencegahan dengan Isoniazid terhadap

HIV atau ODHA.¹⁵ Namun Implementasinya belum meluas. Strategi-strategi yang sudah dilakukan UNAIDS belum sepenuhnya berhasil atau belum efektif. Misalnya saja tentang rekomendasi program UNAIDS yang disebut dengan *Harm Reduction* masih banyak mengalami hambatan dan rintangan. Program *Harm Reduction* bertujuan mengurangi angka penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dan hubungan seks bebas. Dengan kegiatannya membagi-bagikan jarum suntik, pembagian kondom secara gratis. Program ini belum dapat di terapkan sepenuhnya oleh UNAIDS di Indonesia, apalagi di Provinsi Riau karena tidak sesuai dengan budaya Riau. Beberapa faktor tidak efektifnya strategi-strategi UNAIDS ini di Indonesia, khususnya di Riau yaitu dikarekan sulitnya mengubah perilaku para pecandu narkoba untuk mengubah kebiasaan berbagi jarum suntik untuk menggunakan jarum suntik seteril. Kemudian, dengan membagi-bagikan jarum suntik kepada para pecandu narkoba, oleh karena itu program *Harm Reduction* bertentangan dengan hukum Indonesia sesuai UU No 5 Tahun 1997 dan UU No 22 Tahun 1997 karena dinilai program ini justru memberikan dorongan moril kepada para pecandu narkoba untuk tetap menggunakan narkoba. Selanjutnya adalah faktor wilayah, Indonesia yang sangat luas dan terpisah-pisah oleh lautan membuat sulitnya penyebaran informasi sampai ke pelosok nusantara dan kaum muslim di Indonesia sebagian besar menolak program UNAIDS ini terutama

¹⁴Wagubri Libatkan Seluruh Lintas Program Dalam Penanggulangan HIV/AIDS dalam <https://m.hebatriau.com/read-10507-2019-11-05-wagubri-libatkan-seluruh-lintas-program-dalam-penanggulangan-hivaid.html>. diakses pada 23 Oktober 2020.

¹⁵A.O Nababan “Tinjau Baksos Operasi KatarakGubri Berharap Lebih Sering Dilakukan,” dalam <https://www.riausidik.com/pemprovriau-116201-2016-09-27-gubri-berharap-lebih-sering-dilakukan.html>. diakses pada 22 Oktober 2020.

program Harm Reduction karena program membagi-bagikan kondom dan jarum suntik steril berlawanan dengan akidah islam.¹⁶

Daftar Pustaka

Bintang, Amin “Ada 5.859 Kasus HIV/AIDS, Riau Urutan 11 Nasional,” dalam <https://www.cakaplah.com/berita/baca/45228/2019/11/04/ada-5859-kasus-hivaid-riau-urutan-11-nasional>. diakses pada 20 oktober 2020.

Catherine Marshall dan Gretchen B Rossman, *Designing Qualitative Research 2nd Edition*. Sage Publication, California, 1994. hlm. 41

Laode, Muh. Fathun. 2017. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol.1 No.1 Hal. 166. UPN Jakarta.

Evaluasi Program Pemerintah Tentang HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tahun 2012, dipublikasikan oleh Rizki Ananda, FISIP UR. Diakses Pada: <https://media.neliti.com/media/publications/31240-ID-evaluasi-program-pemerintah-tentang-hivaid-di-kota-pekanbaru-tahun-2012.pdf>

Bappenas “Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya”, Diakses di: https://www.bappenas.go.id/files/9113/5230/0986/indonesiamdgbgoal6_20081122001221_518.pdf

A.O Nababan “Tinjau Baksos Operasi Katarak Gubri Berharap Lebih Sering

Dilakukan,” dalam <https://www.riausidik.com/pemprovriau-116201-2016-09-27-gubri-berharap-lebih-sering-dilakukan.html>. diakses pada 22 Oktober 2020.

Humas Pemprov Riau “ Pertemuan Diseminasi Pengobatan Pencegahan TB pada HIV di Provinsi Riau,” dalam <https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/03/21/1863-pertemuan-diseminasi-pengobatan-pencegahan-tb-pada-hiv-di-provinsi>. diakses pada 22 Oktober 2020.

Nizmi, Yusnarida Eka. *Studi Keamanan Internasional*, Pekanbaru: UR Press, 2015, hal. 53

Idayu, Prima R., and Indra Pahlawan. "Efektifitas United Nations Programme On HIV And AIDS (Unaid) Menangani Hiv/aids di Indonesia Tahun 2009-2012." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 1, no. 2, Oct. 2014.

Humas Pemprov Riau “ Pertemuan Diseminasi Pengobatan Pencegahan TB pada HIV di Provinsi Riau,” dalam <https://www.riau.go.id/home/skpd/2017/03/21/1863-pertemuan-diseminasi-pengobatan-pencegahan-tb-pada-hiv-di-provinsi>. diakses pada 22 Oktober 2020.

Wagubri Libatkan Seluruh Lintas Program Dalam Penanggulangan HIV/AIDS dalam <https://m.hebatriau.com/read-10507-2019-11-05-wagubri-libatkan-seluruh-lintas-program-dalam-penanggulangan>

¹⁶Idayu, Prima R., and Indra Pahlawan. "Efektifitas United Nations Programme On HIV And AIDS (Unaid) Menangani Hiv/aids di Indonesia Tahun 2009-2012." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 1, no. 2, Oct. 2014.

hiv aids.html. diakses pada 23 Oktober 2020.

Suhendra, Yulman “Upaya Joint Nations Program On Hiv/Aids (Un aids) Dalam Penanganan Hiv/Aids Di Nigeria,” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/123376-ID-upaya-joint-nations-program-on-hiv-aids-u.pdf>. diakses pada 22 Oktober 2020.

Harm Reduction Di Indonesia dalam <https://www.kebijakan aids indonesia .net/id/beranda/28-pengantar-introduction/385-harm-reduction-di-indonesia>. diakses pada 23 Oktober 2020.